

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Geografis dan Demografis

2.1.1 Gambaran Geografis

Kecamatan Tanah Abang merupakan satu dari delapan kecamatan yang berada di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, terletak pada $160^{\circ}.48'.66''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}.22'.14''$ Lintang Selatan. Permukaan tanahnya relative datar, terletak 2,60 m di atas permukaan laut, dilalui beberapa sungai besar dan kecil seperti sungai Banjar Kanal, sungai cideng, sungai krukut. Pada musim hujan beberapa lingkungan di wilayah Kecamatan Tanah Abang sering mengalami banjir seperti Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir dan sebagian kelurahan lain walaupun hanya terlintasi genangan pada waktu musim hujan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986, bahwa luas wilayah Kecamatan Tanah Abang sekitar 930,31 Ha ($9,31 \text{ Km}^2$) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Kampung Bali : 73,40 ha ($0,73 \text{ Km}^2$)
2. Kelurahan Kebon Kacang : 71,00 ha ($0,71 \text{ Km}^2$)
3. Kelurahan Kebon Melati : 125,63 ha ($1,26 \text{ Km}^2$)
4. Kelurahan Petamburan : 90,10 ha ($0,90 \text{ Km}^2$)
5. Kelurahan Karet Tengsin : 153,43 ha ($1,53 \text{ Km}^2$)
6. Kelurahan Bendungan Hilir : 158,16 ha ($1,58 \text{ Km}^2$)
7. Kelurahan Gelora : 259,13 ha ($2,59 \text{ Km}^2$)

Batas-batas wilayah wilayah Kecamatan Tanah Abang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jalan Jatibaru – Jalan Kebon Sirih
2. Sebelah Selatan : Jalan Jenderal Sudirman
3. Sebelah Barat : Kali Grogol Utara – Jalan Palmerah Utara Jalan K.S. Tubun
4. Sebelah Timur : Kali Cideng—Jembatan Dukuh Atas

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah RT,RW, Rumah Tangga dan Penduduk
Tahun 2006

Kelurahan	Luas Wil	%	RW	RT	Rumah Tangga	Penduduk
Gelora	2,59	27,82	3	12	966	3.047
Bendungan Hilir	1,58	16,97	9	124	12.225	19.696
Karet Tengsin	1,54	16,54	9	72	3.502	14.780
Kebon Melati	1,26	13,53	15	170	7.606	29.387
Petamburan	0,90	9,67	11	103	7.854	28.734
Kebon Kacang	0,71	7,63	11	151	5.368	13.587
Kampung Bali	0,73	7,84	10	83	3.375	12.899
Jumlah Total	9.31	100	63	715	40.896	122.121

Sumber : Profil Kecamatan Tanah Abang tahun 2006, Kecamatan dalam Angka 2006

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah rumah tangga (KK) terbanyak di Kelurahan Petamburan sebanyak 7.854 rumah tangga (kepala keluarga), sedangkan yang terkecil berada di wilayah kelurahan Gelora hanya sebanyak 966 rumah tangga. Padahal kelurahan Gelora memiliki luas wilayah terbesar yakni 2,59 km² namun sedikit dalam jumlah RT, RW, rumah tangga dan jumlah penduduk. Padahal jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Tanah Abang adalah Kelurahan Kebon Melati dengan total penduduk mencapai 29.387, dan hanya memiliki jumlah rumah tangga (KK) sebanyak 7.606 rumah tangga.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2006

Kelurahan	Luas Wil	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio jenis kelamin	Kpdtn Pddk
Gelora	2,59	1.667	1.458	3.047	114,33	1.206
Bendungan Hilir	1,58	9.860	10.085	19.696	97,77	12.623
Karet Tengsin	1,54	7.031	7.847	14.780	89,60	9.661
Kebon Melati	1,26	15.199	14.703	29.387	103,37	23.732
Petamburan	0,90	14.098	14.961	28.734	94.23	32.288
Kebon Kacang	0,71	7.249	6.543	13.587	110,79	19.425
Kampung Bali	0,73	6.565	6.481	12.899	101.30	17.871
Jumlah Total	9.31	61.669	62.078	122.121	99,34	13.292

Sumber : Profil Kecamatan Tanah Abang tahun 2006 & BPS, Kecamatan dalam Angka 2006

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanah Abang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurunnya jumlah penduduk ini disebabkan karena adanya peremajaan lingkungan dalam artian banyaknya lokasi permukiman yang beralih fungsi menjadi kantor dan lokasi bisnis.

Jika diperinci berdasarkan kelurahan maka jumlah terbesar berada di Kelurahan Kebon Melati yang mencapai jumlah 29.387 jiwa dan yang terkecil berada di Kelurahan Gelora yang hanya dihuni 3.047 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Abang. Namun berdasarkan tingkat kepadatan penduduk yang terbesar adalah wilayah Kelurahan Petamburan sebesar 32.288 jiwa .

Adapun mobilitas penduduk karena kelahiran, datang, dan pindah di wilayah Kecamatan Tanah Abang sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
**Mobilitas Penduduk
Tahun 2006**

Kelurahan	Lahir	Mati	Pindah	Datang
Gelora	22	17	41	130
Bendungan Hilir	31	138	434	521
Karet Tengsin	46	209	226	325
Kebon Melati	50	232	214	609
Petamburan	47	103	156	192
Kebon Kacang	69	156	358	584
Kampung Bali	49	162	88	169
Jumlah Total	314	1.017	1.517	2.530

Sumber : Profil Kecamatan Tanah Abang Tahun 2006

2.2 Gambaran Fasilitas Pendidikan

2.2.1 Jumlah sekolah dasar, siswa sekolah dasar, gedung dan guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang

Tabel 2.4
**Jumlah Sekolah Dasar dan Guru
Kecamatan Tanah Abang Tahun 2006**

Kelurahan	Sekolah			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Gelora						
Bend. Hilir	9	2	11	95	20	115
Karet tengsin	7		7	73		73
Kebon Melati	3	4	7	47	34	81

Petamburan	8	4	12	99	40	139
Keb.Kacang	4	2	6	53	23	76
Kamp. Bali	4	3	7	40	35	75
Jumlah Total	35	15	50	407	152	559

Sumber : BPS DKI Jakarta Kecamatan dalam angka tahun 2006

Berdasarkan tabel 2.4 bahwa jumlah sekolah dasar baik negeri maupun yang dimiliki swasta berjumlah 50 buah, terdiri dari 35 buah sekolah dasar negeri dan 15 buah sekolah dasar swasta, dengan jumlah guru sebanyak 559 orang. Jumlah sekolah dasar dan jumlah guru terbanyak berada di wilayah kelurahan Petamburan, sekitar 24 % .

Dari tabel 2.4 ini juga terlihat bahwa Kelurahan Gelora merupakan wilayah yang sudah tidak memiliki sekolah dasar baik negeri maupun swasta dibanding wilayah-wilayah lain di Kecamatan Tanah Abang. Di wilayah ini hanya terdapat satu sekolah menengah atas, selebihnya bangunan perkantoran, sarana gelanggang olah raga senayan, bangunan komersial dan lain sebagainya.

Bila dilihat perbandingan antara jumlah sekolah dengan guru yang ada pada Kecamatan Tanah Abang diperlihatkan bahwa untuk Sekolah Dasar Negeri memiliki perbandingan 1: 11.6 lebih besar dari pada Sekolah Dasar Swasta dengan perbandingan 1: 10.13.

Tabel 2.5
**Jumlah Sekolah Dasar dan Siswa
Kecamatan Tanah Abang Tahun 2006**

Kelurahan	Sekolah			Siswa		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Gelora	0	0	0	0	0	0
Bend. Hilir	9	2	11	1.807	396	2.203
Karet tengsin	7		7	1.333		1.333
Kebon Melati	3	4	7	1.242	645	1.887
Petamburan	8	4	12	2.243	569	2.812
Keb.Kacang	4	2	6	1.118	379	1.497
Kamp. Bali	4	3	7	800	273	1.073
Jumlah Total	35	15	50	8.543	2.262	10.805

Sumber : BPS DKI Jakarta Kecamatan dalam angka tahun 2006

Menurut tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah siswa yang dimiliki 50 buah sekolah dasar negeri maupun swasta adalah sebesar 10.805 siswa. Jumlah terbesar siswa sekolah dasar di Kecamatan Tanah Abang berada di wilayah Kelurahan Petamburan yakni sebesar 2.812 siswa, sekitar 20% dari jumlah total.. Sedangkan yang terendah berada di wilayah Kelurahan Gelora yang tidak memiliki sekolah dasar, negeri maupun swasta, jadi sekitar 0 %.

Bila dilihat perbandingan antara jumlah sekolah dengan siswa yang ada pada Kecamatan Tanah Abang diperlihatkan bahwa untuk Sekolah Dasar Negeri memiliki perbandingan 1: 224.086 lebih besar dari pada Sekolah Dasar Swasta dengan perbandingan 1: 150.8.

2.2.2 Kondisi eksisting fasilitas

Kondisi eksisting sekolah dasar negeri dan swasta di wilayah Kecamatan Tanah Abang berdasarkan lokasi seperti yang terlihat dalam tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini :

Tabel 2.6
Data SD Negeri di Kecamatan Tanah Abang

No	Nama Sekolah Dasar	Lokasi
1	SDN Bendungan Hilir 01 Pg	Jl Danau Toba Penjompongan
2	SDN Bendungan Hilir 02 Ptg	Jl Danau Toba Penjompongan
3	SDN Bendungan Hilir 03 Pg	Jl Danau Toba Penjompongan
4	SDN Bendungan Hilir 05 Pg	Jl Danau Limboto No 10
5	SDN Bendungan Hilir 06 Ptg	Jl Danau Limboto No 10
6	SDN Bendungan Hilir 07 Pg	Jl Danau Limboto No 10
7	SDN Bendungan Hilir 09 Pg	Jl. Danau Maninjau
8	SDN Bendungan Hilir 11 Pg	Jl Taman Bendungan Jati luhur
9	SDN Bendungan Hilir 12 Pg	Jl Taman Bendungan Jati luhur
10	SDN Karet Tengsin 01 Pg	Jl. Karet Pasar Baru Timur III
11	SDN Karet Tengsin 09 Pg	Jl . Karet Pasar Baru Barat VII
12	SDN Karet Tengsin 13 Pg	Jl . Karet Pasar Baru Barat VII
13	SDN Karet Tengsin 14 Ptg	Jl . Karet Pasar Baru Barat VII
14	SDN Karet Tengsin 15 Pg	Jl . Karet Pasar Baru Barat IV
15	SDN Karet Tengsin 16 Pg	Jl . Karet Pasar Baru Barat IV
16	SDN Karet Tengsin 21 Pg	Jl. Masjid I
17	SDN Petamburan 01 Pg	Jl. Petamburan IV
18	SDN Petamburan 02 Ptg	Jl. Petamburan IV
19	SDN Petamburan 03 Pg	Jl. Petamburan IV
20	SDN Petamburan 04 Ptg	Jl. Petamburan IV
21	SDN Petamburan 05 Pg	Jl. Petamburan II

22	SDN Petamburan 06 Pg	Jl. Petamburan II
23	SDN Petamburan 07 Pg	Jl. Petamburan II
24	SDN Petamburan 08 Pg	Jl. Petamburan II
25	SDN Kebon Melati 01 Pg	Jl. H. Sabeni No. 12
26	SDN Kebon Melati 02 Pg	Jl. H. Sabeni No. 12
27	SDN Kebon Melati 03 Pg	Jl. H. Sabeni No. 12
28	SDN Kebon Kacang 01 Pg	Jl. Kebon Kacang Raya No. 48
29	SDN Kebon Kacang 02 Ptg	Jl. Kebon Kacang Raya No. 48
30	SDN Kebon Kacang 03 Pg	Jl. Kebon Kacang Raya No. 48
31	SDN Kebon Kacang 05 Pg	Jl. Kebon Kacang XI
32	SDN Kampung Bali 01 Pg	Jl. Jatibaru No. 10
33	SDN Kampung Bali 02 Ptg	Jl. Jatibaru No. 10
34	SDN Kampung Bali 03 Pg	Jl. Hati Suci No. 7
35	SDN Kampung Bali 07 Pg	Jl. Kampung Bali 25/13

Tabel 2.7

Data SD Swasta di Kecamatan Tanah Abang

No	Nama Sekolah Dasar	Lokasi
1	SD Kristen Advent	Jl Taman Bendungan Jati luhur No. 62
2	SD Islam Al Abrar	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 148
3	SD Kristen Strada	Jl. Petamburan IV
4	SD Nurul Islam	Jl. Petamburan V/42
5	SD Kristen Bethel	Jl. KS. Tubun No. 253
6	SD Islam Khairul Uswah	Jl. Petamburan II/43
7	SD Nurani Insani	Jl. Petamburan III/4
8	SD Islam Said naum	Jl. K.H. Mas Manshur No.25
9	SD Muhammadiyah 56	Jl. K.H. Mas Manshur No. 65
10	SD Nasional	Jl. Martapura Ujung No. 1 A
11	SD Islam An-Najah	Jl. Martapura I
12	SD Nirwana	Jl. Jati Bunder VII/181
13	SD Hati Suci	Jl. Hati Suci No. 2 Kampung Bali
14	SD Kwitang I PSKD	Jl. Taman Kebon sirih III/46 A
15	SD Meya	Jl. Jati Baru

Berdasarkan lokasi sekolah dasar, yang terbanyak memiliki sekolah dasar negeri dan swasta adalah kelurahan Petamburan, hal ini karena jumlah penduduk di kelurahan ini paling banyak di Kecamatan Tanah Abang. Dari sini bisa terlihat bahwa jumlah usia sekolah di kelurahan ini juga terbanyak. Artinya fasilitas pendidikan terutama pendidikan dasar juga harus tersedia sesuai jumlah penduduk, khususnya jumlah penduduk usia sekolah

Secara umum kondisi bangunan fasilitas pendidikan tahun 2006 yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Abang dalam keadaan baik, artinya kondisi bangunan

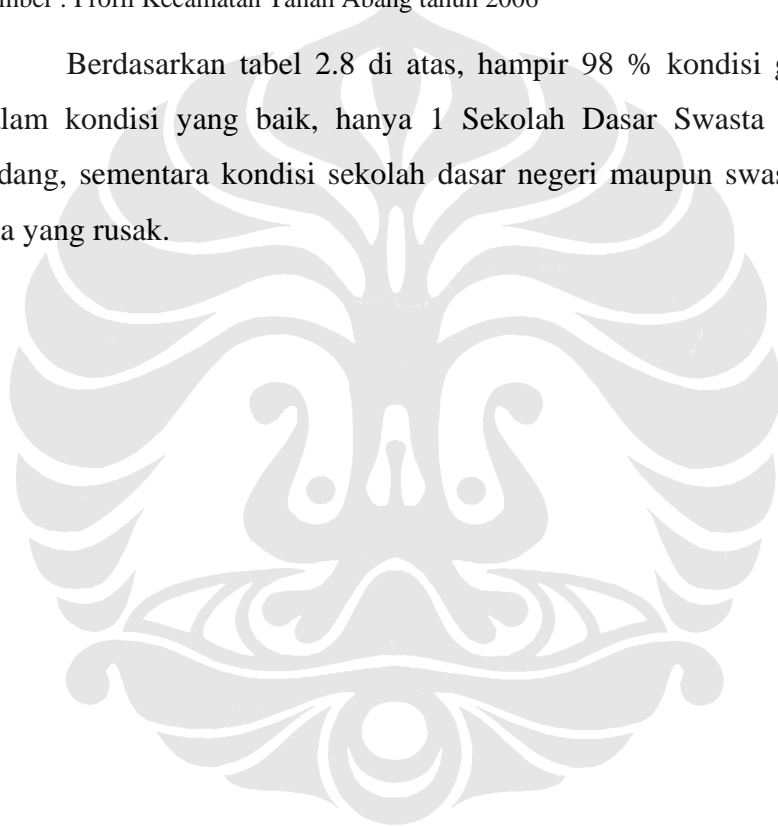
yang ada cukup terawat. Khusus bangunan fisik Sekolah Dasar baik negeri maupun yang dimiliki swasta dalam kondisi baik. Hal ini dapat terlihat dalam tabel 2.9

Tabel 2.8
Kondisi Fasilitas Pendidikan TK/SD

Jenis Sekolah	Status		Status Gedung		Kondisi		
	Negeri	Swasta	Miik	<i>Numpang</i>	Baik	Sedang	Rusak
TK		28	26	2	20	6	2
SD	35	15	50		49	1	

Sumber : Profil Kecamatan Tanah Abang tahun 2006

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, hampir 98 % kondisi gedung Sekolah Dasar dalam kondisi yang baik, hanya 1 Sekolah Dasar Swasta berada dalam kondisi sedang, sementara kondisi sekolah dasar negeri maupun swasta menunjukkan tidak ada yang rusak.



3 . TINJAUAN LITERATUR

3.1 Kota sebagai pusat pelayanan

Perkembangan penduduk merupakan faktor penentu bagi sebuah kota sebagai pusat pelayanan. Kota pada dasarnya merupakan konsentrasi kegiatan masyarakat. Sebagai pusat pelayanan berarti kota merupakan pusat yang memberikan pelayanan bagi wilayah pengaruhnya dalam penyediaan barang dan jasa.

Secara umum pusat pelayanan mempunyai tiga fungsi, yaitu (Soedarman, 1982:107):

- a. Fungsi pelayanan: memberikan pelayanan kepada daerah sekitarnya
- b. Fungsi permukiman: merupakan konsentrasi tempat pemukiman penduduk
- c. Fungsi ekonomi: merupakan konsentrasi aktivitas ekonomi dengan adanya fasilitas ekonomi seperti pasar dan industri yang terletak di pusat tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soedarman (1982) bahwa dalam pusat pelayanan terdapat pengelompokan penduduk yang terdiri dari beberapa jenjang hirarki. Hirarki tersebut ditentukan berdasarkan besarnya intensitas dan jangkauan pelayanan yang ada di setiap pusat. Klasifikasi pusat tersebut antara lain:

a. Pusat primer

Biasanya disebut sebagai wilayah lokal yang berisi semua pelayanan keperluan primer untuk penduduk yang dapat digunakan setiap hari seperti SD, klinik, toko, dan sebagainya. Radius pelayanan pusat primer tergantung banyak faktor, salah satunya adalah jumlah penduduk dan distribusi ruang seperti jarak menuju pusat juga perlu dipertimbangkan.

b. Pusat primer tambahan

Pusat ini merupakan bagian dari pusat primer yang berfungsi sebagai pelengkap pusat primer. Fasilitas yang dapat diberikan berupa: toko kecil, sekolah tambahan (taman kanak-kanak, madrasah), sekolah yang kelasnya lebih rendah dari SD (SD Inpres).

c. Pusat sekunder

Biasanya disebut sebagai pusat regional, yang berisi beberapa pelayanan yang frekuensinya dipakai tidak hanya untuk kebutuhan harian, tetapi juga untuk kebutuhan penduduk yang lebih besar. Secara umum pusat sekunder harus dapat dengan mudah dicapai, atau dengan kata lain harus dekat dengan jaringan jalan. Fasilitas yang ada berupa pusat kesehatan, sekolah lanjutan pertama dan lain sebagainya.

d. Pusat tersier

Ditunjukkan dengan besarnya jumlah bangunan pemerintahan. Biasanya lebih sering disebut sebagai pusat kecamatan atau kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan suatu daerah.

e. Pusat yang lebih tinggi lagi

Pusat ini mempunyai fungsi pelayanan tingkat nasional dan internasional biasanya ditunjukkan dengan adanya kedudukan pemerintahan nasional, pusat industry, pelabuhan, rumah sakit umum dan sebagainya.

Sistem pelayanan perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta membutuhkan fasilitas perkotaan yang merupakan utilitas umum. Fasilitas perkotaan dapat juga disebut fasilitas umum dan sosial. Fasilitas sosial dimaksudkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri atas bangunan atau bentuk fisik lainnya (Koestoer, 1997)

Dengan demikian sekolah dasar termasuk dalam pusat primer yang berfungsi memberikan pelayanan berupa pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu dibutuhkan fasilitas pendidikan berupa gedung fisik sekolah dasar yang dapat dipergunakan masyarakat sekitarnya.. Pertimbangan akan lokasi menjadi penting terkait dengan jumlah penduduk dan distribusi kebutuhan ruang. Pemanfatan fasilitas pendidikan secara optimal oleh masyarakat dapat diartikan pula bahwa pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan warga kotanya.

Berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar yang telah dikeluarkan pemerintah kota

3.2 Konsep Lokasi

Penyediaan fasilitas pendidikan sekolah dasar seharusnya mempertimbangkan faktor lokasi. Lokasi terkait erat dengan aksesibilitas dan lingkungan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Keneth M Lust (1997 :45) yang menyatakan *"The two categories of locational factors are accesibility and neighborhood"*

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekeunsinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut (Tarigan, 2005).

Berdasarkan Rencana Induk Jakarta (1965-1985) dan Standar fasilitas pendidikan dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa radius pencapaian ke lokasi sekolah sekitar 1000 meter, dengan letak yang masih ditengah-tengah kelompok penduduk, sedapat mungkin lokasinya menghindari penyeberangan-penyeberangan lalu lintas kereta api atau mobil dalam perjalanan anak-anak ke dan dari rumah ke sekolah.

Golany (Indah, 2004) menyatakan bahwa lokasi suatu fasilitas pendidikan haruslah melihat beberapa faktor, seperti faktor usia murid dan jarak sekolah dari tempat tinggal murid. Sekolah harus dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki, asumsi yang digunakan adalah jika murid harus menggunakan jasa transportasi, maka harus ada biaya transportasi yang dikeluarkan, dan hal ini akan berdampak bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi kelas bawah. Dari sini jelaslah bahwa jarak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka pemanfaatan fasilitas pendidikan .

Sedangkan Chapin (1972) mempunyai tabel tersendiri untuk menentukan standar jarak dalam kota termasuk jarak antara sekolah dasar dengan tempat tinggal dengan berjalan kaki. Berikut tabel tersebut :

Tabel. Standar jarak dalam kota

No.	Prasarana	Jarak dari tempat tinggal (berjalan kaki)
1	Pusat tempat kerja	20 – 30 menit
2	Pusat kota (dengan pasar, dan sebagainya)	30 – 45 menit
3	Pasar local	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
4	Sekolah Dasar	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
5	Sekolah Menengah Pertama	1½ km atau 20 menit
6	Sekolah Lanjutan Atas	20 atau 30 menit
7	Tempat bermain anak-anak dan taman lokal	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
8	Tempat olah raga dan pusat lalita (rekreasi)	1½ km atau 20 menit
9	Taman untuk umum atau cagar (seperti kebun binatang, dan sebagainya)	30 – 60 menit

Menurut Barleff (Indah, 2004) bahwa penempatan lokasi pendidikan harus melibatkan berbagai pihak dan departemen yang terkait, sehingga lokasi sekolah dapat meminimalkan resiko kecelakaan, kriminalitas, dan bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi pada anak-anak usia sekolah. Selain itu peletakan sekolah juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah harus bersih dan memperhatikan sanitasi lingkungan.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam konsep lokasi berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah dasar yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa lokasi sekolah dasar berada di wilayah permukiman sesuai dengan cakupan sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik.

Berdasarkan konsep-konsep diatas maka dapat diartikan bahwa lokasi dalam konteks sekolah dasar sebagai fasilitas pendidikan adalah aksesibilitas dan lingkungan. Aksesibilitas dimaksud adalah jarak antara rumah tinggal ke sekolah, dan lingkungan dimaksud adalah kondisi keamanan dan kenyamanan dari sekolah dasar tersebut..Aman dari kecelakaan, kejahatan, penculikan yang bisa saja terjadi menimpa peserta didik sekolah dasar. Dan nyaman dari hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, seperti lokasi sekolah tidak banjir dan lain sebagainya.

3.3. Fasilitas Sekolah

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada warga kota, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka dibutuhkan jenis fasilitas sekolah. Hal ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kelompok komunitas dalam masyarakat. Dalam merencanakan fasilitas ini, titik tolaknya bermula dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dengan dasar ini dapat ditentukan perencanaan awal mengenai jumlah siswa yang memerlukan pelayanan fasilitas ini dan berapa daya tampung yang mungkin tersedia. Sejalan dengan itu dibutuhkan pula daya tampung yang efektif dan efisien (Koestoer : 1977)

Pengertian fasilitas sekolah seperti yang dituliskan oleh Leung, Chan dan Wang (2006) adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Beberapa aspek yang diukur dalam menilai fasilitas sekolah diantaranya adalah *space management, allocation of seats, common room, outside view, lighting, ventilation, temperature, teching facilities, indoor plant, noise, privacy, safety and security.*

Kelengkapan fasilitas pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 42 ayat 2 adalah Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasaran pendidikan yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pengertian lain dari fasilitas diambil berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah yaitu dalam pasal 1 mengenai Ketentuan Umum. Dalam materi tersebut disebutkan pengertian fasilitas sosial, yaitu sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan,

olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

Fasilitas sekolah (sarana dan prasarana) merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi minat disamping faktor kualitas sekolah, terhadap minat seseorang untuk menyekolahkan putra-putrinya dinyatakan oleh Sardiman (1996). Penelitian terhadap kualitas sekolah mempengaruhi minat orang tua juga dilakukan oleh Neliwati (2004) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh fasilitas sekolah terhadap minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Pemilihan sekolah dilakukan karena ada dorongan orang tua untuk menjadikan anaknya lebih berkualitas. Menciptakan anak yang berkualitas merupakan harapan bagi setiap orang tua. Karena itu mereka lebih selektif dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya.

Berdasarkan Rencana Induk Jakarta (1965-1985) dan Standar fasilitas pendidikan dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa fasilitas pendidikan yang dapat terliput adalah bagi lingkungan permukiman yang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1600 jiwa dibutuhkan fasilitas untuk sekolah dasar. Fasilitas ini diperuntukkan bagi anak-anak usia antara 6 – 12 tahun. Ruang minimum yang dibutuhkan 6 ruang. Luas tanah sekitar 2000 m².

Dalam Rencana Umum Tata Ruang tahun 2005, tidak diatur ketentuan pendirian fasilitas pendidikan seperti yang dikemukakan di atas. Namun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010 telah terjadi perubahan tentang ketentuan pendirian sarana pendidikan sekolah dasar dari segi luas tanah, luas bangunan yang dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk. Untuk penyediaan sarana pendidikan sekolah dasar dibutuhkan luas tanah 3.000 m², luas bangunan 1.100 m², dan jangkauan jumlah penduduk 2.500 jiwa.

Menurut Jayadinata (1999, 161) menjelaskan bahwa dalam penyediaan beberapa prasarana untuk umum di Indonesia diberikan standar luas. Ketentuan prasarana pendidikan sekolah dasar enam tahun harus ada 6 ruang: tiap ruang bagi 40 murid. Luas tanah yang diperlukan 8000 m². Dapat melayani suatu lingkungan dengan 3200 penduduk.

Berdasarkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah dasar disebutkan tentang lahan atau luas tanah yang diperlukan untuk mendirikan

sekolah yang merupakan fasilitas sekolah, harus memenuhi kebutuhan antara lain :

1. Ruang Pendidikan, meliputi :
Ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat bermain/fasilitas olah raga, dan tempat upacara
2. Ruang administrasi/kantor, meliputi :
Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha
3. Ruang penunjang, meliputi :
Ruang ibadah, ruang UKS, ruang koperasi/kantin/warung sekolah, kebun sekolah/taman sekolah/halaman sekolah, ruang serba guna, gudang

Dengan demikian, dari beberapa konsep fasilitas yang dikemukakan, maka yang dimaksud dengan fasilitas sekolah dalam penelitian ini adalah fasilitas sekolah yang mencakup lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang.

3.4 Kualitas Sekolah

Kualitas disamaartikan dengan kebaikan, keindahan, kecantikan, ataupun sesuatu yang ideal. Kualitas pendidikan tidak hanya mencakup kualitas pengetahuan, keilmuan, dan ketarampilan, akan tetapi juga pembentukan sikap kritis, kreatif, tanggung jawab, berswadaya dan reflektif atas tata nilai yang dianutnya sendiri. Dalam konteks kualitas sekolah maka pendekatan yang digunakan adalah kualitas pendidikan, maka kualitas pendidikan diartikan sebagai fakta tentang keunggulan dan keandalan mutu sekolah yang tercermin pada kualitas siswa, kualitas guru, dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta hasil prestasi belajar siswa. (Silverius, 1996)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari pendidikan dan lulusan yang berkualitas, dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang optimal, secara langsung ikut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkualitas dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kualitas sekolah, relevansi, peningkatan peran swasta, tingginya angka putus sekolah, dan kualitas guru.

Kualitas sekolah tidak hanya mencakup kuantitas dan kualitas pengetahuan, keilmuan dan keterampilan. Akan tetapi juga pembentukan sikap kritis, kreatif, tanggung jawab, bereswada, dan reflektif atas tata nilai yang dianutnya sendiri.

Kualitas sekolah (faktor guru, kurikulum, prestasi siswa) merupakan salah satu faktor luar yang berasal dari individu yang mempengaruhi faktor yang berasal dari dalam seperti minat, bakat intelegensi dan sebagainya. (Sardiman, 1996) Penelitian yang berhubungan dengan kualitas sekolah terhadap minat juga dilakukan diantaranya oleh Lekat Reniyadi (1997) yang menyatakan bahwa kualitas sekolah merupakan salah satu yang mempengaruhi minat orang tua menyekolahkan putra-putrinya, di samping status sosial ekonomi dan kondisi siswa. Sementara Neliwati (2004) dalam penelitiannya yang berhubungan dengan kualitas sekolah, berkesimpulan bahwa minat orang tua atau masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dipengaruhi oleh kualitas sekolah (kurikulum) dan fasilitas yang ada di sekolah tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas sekolah diperlukan manajemen sekolah yang berkualitas, integritas kepala sekolah yang tinggi, lingkungan sekolah yang kondusif, selain diperlukan guru-guru yang berkompeten, terlibat dan jumlah yang semakin besar, sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan hal ini, Tilaar (1998) menyatakan bahwa kunci utama di dalam peningkatan kualitas sekolah ialah mutu para gurunya. Lebih jauh Tilaar (1998) juga berpendapat bahwa pendidikan yang berkualitas bukan hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik, tetapi juga perlu mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kebudayaan. Pendidikan formal bukan hanya mengembangkan intelegensi sekolastik tetapi juga mengembangkan intelegensi emosional, spatsial, interpersonal dan intrapersonal, dan seterusnya. Sistem pendidikan nasional haruslah memberikan kesempatan untuk perkembangan spektrum intelegensi yang luas itu. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Dengan peningkatan manajemen sekolah, integritas kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, peningkatan kualitas dan penghargaan, yang layak terhadap profesi guru, diharapkan dapat dibangun suatu sistem pendidikan yang menuju lahirnya masyarakat demokratis, berdisiplin, bersatu penuh toleransi dan pengertian, serta dapat bekerjasama.

Dalam hubungan dengan mutu sekolah, banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau yang diterima di dunia usaha (Slamet, 1998) Padahal pada era globalisasi ini masyarakat sudah mulai kritis dan selektif dalam menentukan sekolah mana yang dapat memberi jaminan masa depan tamatannya yang lebih baik. Disisi lain Heyneman dan Loxley menyimpulkan bahwa kualitas sekolah dan guru hampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia; dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut.(Budiono, 1999)

Kualitas sekolah atau pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah dapat diukur melalui kinerja kualitas internal dan eksternal. Kualitas internal termasuk didalamnya guru, kepala sekolah, dan staf pendidikan lainnya. Dan kualitas eksternal adalah peserta didik/siswa.(Nurkolis, 2003)

Kualitas sekolah harus dibangun melalui pengelolaan secara profesional bagi keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dalam rangka membawa anak didik sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan yang dimaksud adalah berupa sumber daya manusia di sekolah termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, petugas sekolah; kemudian material yakni kurikulum, alat peraga, dana; lingkungan sekolah yang terkait dengan jaringan di luar sekolah, seperti misalnya pusat pelatihan guru, badan akreditasi, dan lain-lain; dan terakhir proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri, seperti kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. (Bafadal,2006).

Dari berbagai konsep yang diterangkan di atas, maka yang termasuk dalam kualitas sekolah dalam konsep penelitian ini adalah kualitas guru, kualitas siswa,

prestasi hasil belajar (kualitas pengajaran). Sementara kualitas sarana dan prasarana termasuk fasilitas fisik sekolah.

3.5 Minat Masyarakat

Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif anak terhadap aspek-aspek lingkungan. Ada juga yang mengartikan minat sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. Meichati (1972) mengartikan minat adalah perhatian yang kuat, intensif dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Aspek minat terdiri dari aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif berupa konsep positif terhadap suatu obyek dan berpusat pada manfaat dari obyek tersebut. Aspek afektif nampak dalam rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi terhadap obyek tersebut.

Blam dan Balinsky dalam Mukhlis (1998) membedakan minat menjadi dua yaitu minat subjektif dan minat objektif. Minat subjektif adalah hasil penilaian seseorang terhadap pengalaman tertentu yang menyenangkan. Minat objektif yaitu reaksi positif yang ditimbulkan oleh objek dan aktifitas dalam berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengetahui minat seseorang terhadap objek tertentu, Super dan Crites dalam Mukhlis (1998) mengelompokkan minat dalam empat cara :

- a. Expressed Interest yaitu minat yang dapat diketahui dari jawaban responden (subjek) terhadap pertanyaan tentang objek atau pekerjaan yang disenangi.
- b. Manifested Interest yaitu minat yang dapat diketahui dari pengamatan terhadap kegiatan yang sering dilakukan subjek.
- c. Tested Interest yaitu minat yang dapat diketahui melalui kesimpulan dari hasil tes objektif.

d. Inventoried Interest yaitu minat yang dapat diketahui melalui daftar isian terhadap objek yang disenangi yang disediakan, kemudian subjek akan memilih sesuai dengan minatnya terhadap objek tertentu.

Dari pengertian di atas, maka minat dapat dikatakan sebagai kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari atau mencoba aktivitas-aktivitas tertentu. Kecenderungan-kecenderungan tersebut dapat diketahui melalui menjawab pertanyaan tentang objek, pengamatan, kesimpulan dari hasil tes objektif, dan melalui pemilihan terhadap objek tertentu.

Setiap subjek individu memiliki perbedaan perilaku dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku yang berbeda inilah yang dikenal dengan perilaku konsumen atau dalam hal ini perilaku pengguna fasilitas. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal (dari dalam) maupun dari faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal merupakan faktor psikologis yang berasal dari intern individu yang akan berpengaruh pada perilaku konsumen, faktor ini antara lain motivasi, persepsi atau pengamatan, pengalaman, sikap, kepribadian dan konsep diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya konsumen yang berasal dari lingkungan yang berbeda akan memiliki penilaian, kebutuhan, pendapat atau sikap yang berbeda-beda pula. Faktor ini termasuk didalamnya antara lain kebudayaan, kelompok sosial atau kelas sosial dan keluarga.

Menurut Martin Handoko (1992), kedua faktor di atas, dikelompokkan ke dalam motif ekstrinsik dan Intrinsik. Hubungan faktor dalam dan faktor luar di dalam berperilaku sangat erat. Oleh sebab itu untuk menentukan apakah suatu tindakan digerakkan oleh motif ekstrinsik atau intrinsik dapat dilihat dari hubungan timbal balik antara faktor dalam dan faktor luar.

Di dalam tindakan yang bermotif ekstrinsik prosesnya adalah sebagai berikut : rangsang dari luar (faktor luar) kemudian rangsang tersebut menggerakkan individu untuk berbuat, contoh motif ini adalah orang belajar giat agar menjadi yang terbaik, orang yang bekerja demi upah yang tinggi dan sebagainya. Sedangkan motif intrinsik proses tindakannya adalah sebagai berikut inisiatif dari dalam diri individu kemudian berdasarkan inisiatif tersebut mencari objek yang reevan (faktor luar).

Minat masyarakat merupakan gambaran perilaku-perilaku individu dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang didorong oleh kedua motif di atas. Dorongan motif tersebut terhadap perilaku-perilaku individu tersebut tercermin dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam memilih barang dan jasa maupun dalam memilih pusat pelayanan. Sekolah merupakan jasa pelayanan pendidikan yang dapat dipilih masyarakat berdasarkan minat atau keinginannya. Dari sini kemudian menimbulkan harapan masyarakat terhadap sekolah agar anak-anak mereka menjadi siswa yang mempunyai kualitas.

Harapan masyarakat tersebut akan memberikan nilai prioritas tersendiri bagi pemilihan terhadap sekolah dasar. Pemilihan minat terhadap sekolah dasar negeri menjadi prioritas atau tidak merupakan ukuran pemanfaatan sekolah dasar negeri oleh masyarakat sekitar. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sekolah dasar adalah terkait dengan fasilitas yang ada dalam sekolah tersebut, guru dan siswa, serta dimana lokasi fasilitas tersebut berada. Oleh karena itu dalam penelitian ini minat masyarakat diarahkan kepada penentuan kecenderungan atau prioritas yang akan dipilih dalam rangka memanfaatkan sekolah dasar negeri yang dipengaruhi oleh lokasi, fasilitas dan kualitas sekolah dasar tersebut.

3.6 Sekolah dasar negeri sebagai aset

Sebelum membahas lebih dalam tentang lokasi, fasilitas dan kualitas sekolah dasar sebagai aset, berikut ini akan diterangkan beberapa pengertian tentang aset.

Menurut Doli D. Siregar (2000:178) menjelaskan tentang pengertian aset secara umum, adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan)”

Masih menurut Doli bahwa aset dapat di bagi dua yaitu aset berwujud (*tangible assets*) bentuk fisik seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya :dan asset yang tidak berwujud (*intangible assets*) seperti hak cipta, hak paten, royalti, mutu dan sejenisnya

Sedangkan menurut Atep Adyabarata aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai. Dua elemen dari definisi tersebut—nilai dan umur manfaat – merupakan hal yang fundamental, jika suatu departemen/organisasi mengidentifikasi dan mencatat seluruh aset.(Atep Adyabarata, 2006)

Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Barang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, aset daerah disebut juga barang daerah adalah semua kekayaan pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang stándar Akuntansi Pemerintahan, bahwa pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dengan demikian pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki, atau dikuasai pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki nilai dan umur manfaat baik ekonomi dan atau social sebagai akibat peristiwa masa lalu yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Contohnya adalah jalan, jembatan, tempat peribadatan, pasar, taman kota, rumah sakit, saluran air, lapangan, sekolah dan lain-lain.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD atau yang

diperoleh dari pendapatan yang sah menjadi aset daerah. Aset daerah, ditinjau dari segi fungsi pemerintahan, adalah:

1. Aset berfungsi ekonomis, adalah aset daerah pada BUMD/PT, yang dimanfaatkan/didayagunakan/ optimalisasi.
2. Aset berfungsi sosial dan keagamaan, adalah aset daerah berupa fasilitas sosial (misalnya sekolah, panti-panti sosial, fasilitas olahraga, dll), fasilitas ibadah (tempat-tempat ibadah yang dibangun Pemerintah maupun yang difasilitasi dengan aset daerah).
3. Aset berfungsi pelayanan, adalah aset daerah berupa sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas umum misalnya jalan dan jembatan, utilitas, sarana umum lainnya.
4. Aset sebagai potensi daerah, adalah aset daerah berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal (tanah kosong, bangunan eks. Kanwil, dll)

Dari pemahaman ini sekolah mempunyai dua fungsi sebagai aset yang berfungsi social dan berfungsi sebagai pelayanan. Sekolah Dasar yang dibangun pemerintah kota merupakan bentuk pelayanan dan sosial dalam bidang pendidikan yang diberikan untuk warga kota. Sekolah dasar (termasuk di dalamnya lokasi, fasilitas dan kualitas) merupakan bagian aset yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah agar sekolah dasar sebagai aset dapat mendatangkan manfaat semaksimal mungkin.

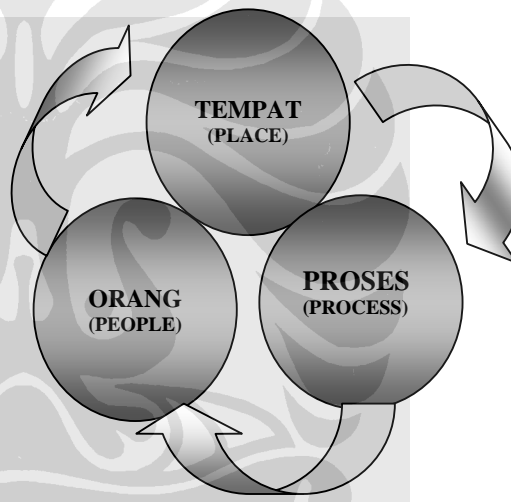
Dengan demikian, sekolah dasar negeri yang dibangun pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai yang akan mendatangkan manfaat non ekonomis atau social di masa yang akan datang. Hal ini merupakan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan yang harus disediakan untuk kepentingan warga masyarakat.

Nilai dari aset dalam sektor public (*public sector*) lebih ditekankan pada besaran manfaat yang diberikan aset sebagai alat (tempat) melayani masyarakat dibanding besaran imbalan (*return*) dalam bentuk lainnya (Barata, 2007). Manfaat dimaksud adalah manfaat yang dirasakan sekarang (*recent benefit*) maupun manfaat yang akan datang (*future benefit*). Sedangkan imbalan balik lain dimaksudkan hasil dalam bentuk uang (rupiah) sebagai imbalan prestasi

penggunaan aset milik negara/daerah oleh pihak ketiga, disamping manfaat langsung saat digunakan/dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.

Sekolah sebagai sebuah organisasi memerlukan berbagai fasilitas penunjang dalam mencapai kerja yang maksimal sesuai visi dan misi dan sasaran strategi yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian kinerja terbaik (best performance). Selain itu efektifitas dari sekolah yang ada dalam mendukung penyediaan pelayanan juga harus dapat ditentukan.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan organisasi yang produktif dan efektif, yaitu OTP (3 P's) : Orang (*People*), Tempat (*Place*), dan Proses (*Process*), ditambah dengan fasilitas lainnya yang berguna dalam berproses.

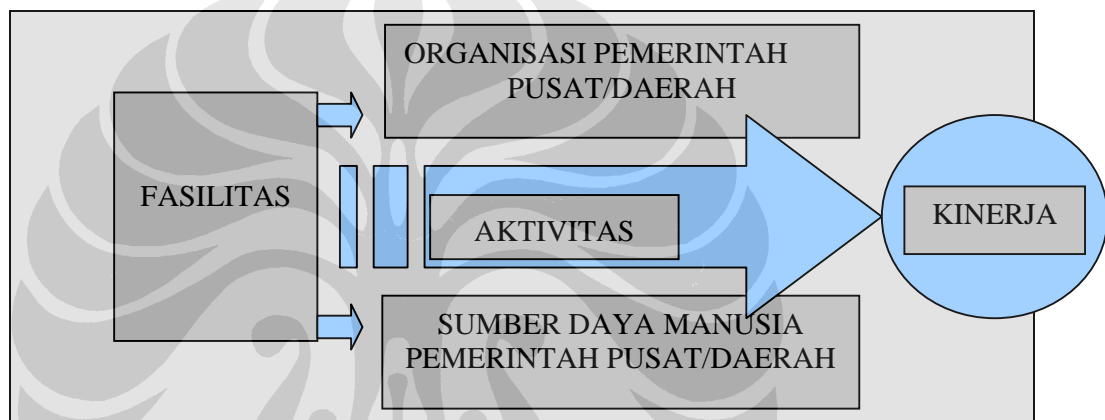


Gambar 2.1. Inti Organisasi Produktif (Barata 2007)

- 1) “Orang” sebagaimana dimaksud adalah sumber daya manusia dalam organisasi, yang meliputi jajaran pimpinan sebagai pihak yang menetapkan kebijakan dan staf sebagai pihak yang menjalankan tugas-tugas (tingkat penyelia dan pelaksana);
- 2) “Tempat” adalah sesuatu yang mutlak diperlukan sebagai tempat beraktivitas melaksanakan pekerjaan; dan
- 3) “Proses” adalah mekanisme kerja dan kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan visi dan misi organisasi.

Penyediaan *tempat* sebagaimana dimaksud, tentu saja berkaitan dengan penyediaan berbagai *fasilitas operasional* yang diperlukan untuk mendukung sumber daya manusia dalam berproses untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan *fasilitas non operasional* sebagai sarana penunjang. Fasilitas yang dimaksud adalah berupa aset fisik (*physical assets*) berupa tanah dan bangunan.

Pemanfaatan aset fisik berupa tanah dan bangunan (*land and building*). Baik untuk pemanfaatan aset yang termasuk kelompok aset yang diklasifikasikan sebagai aset operasional (*operational assets*) maupun aset non operasional (*non operational assets*)



Gambar 2.2. Hubungan Fasilitas dan Kinerja (Barata 2007)

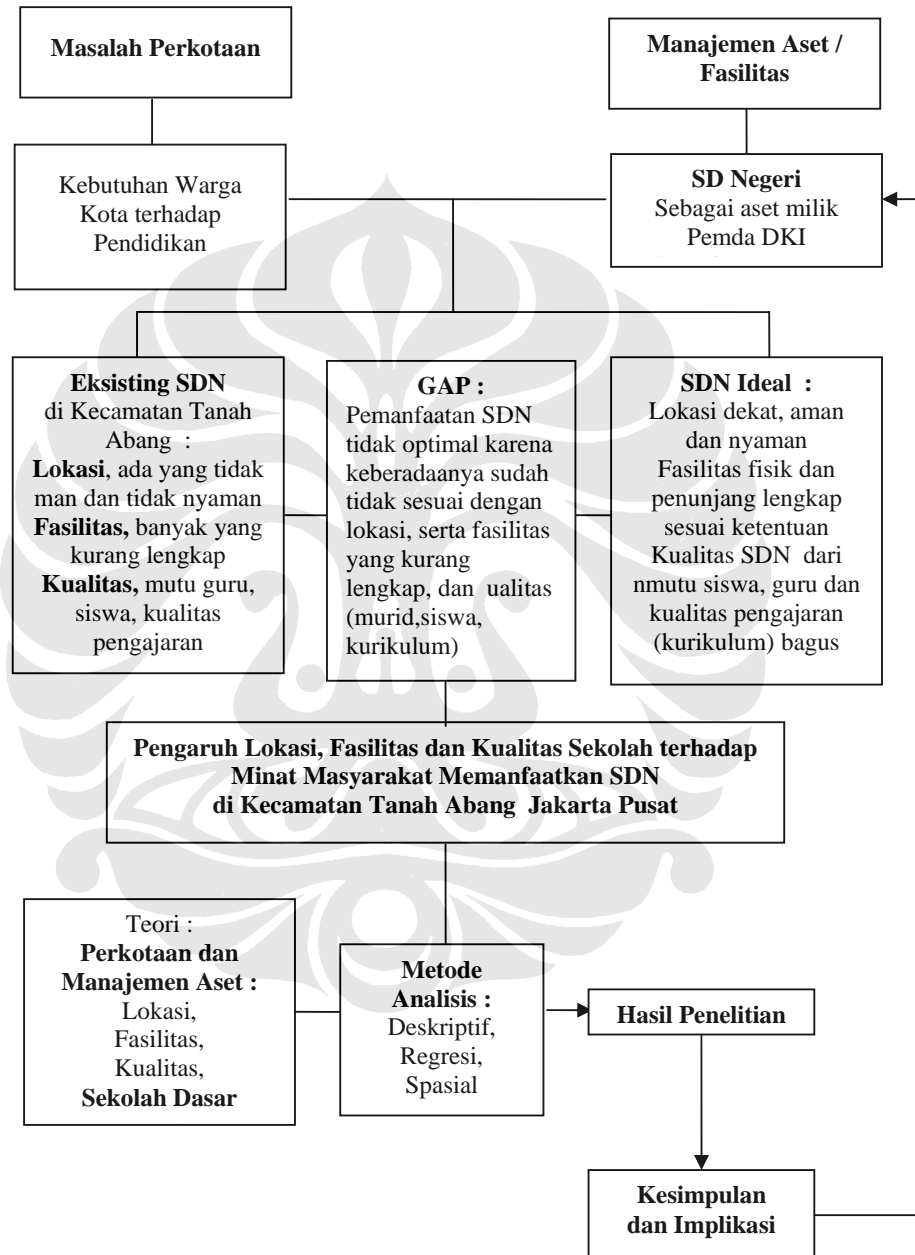
Menurut Atep Adyabarata pengertian "penggunaan aset yang optimum" tergantung kepada bagaimana kita menyikapi prinsip pemanfaatan yang terbaik dan tertinggi tersebut. Untuk ini kita perlu mempunyai ukuran yang akan dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*). Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dan akan dapat mendekatkan kita kepada pemahaman umum dari kata "optimal". Hal ini biasanya ditunjukkan oleh adanya titik keseimbangan antara :

- 1) *biaya, risiko, dan manfaat*, atau
- 2) *biaya, risiko, dan hasil*, atau
- 3) keseimbangan antara *biaya, risiko, dan produksi*.

Sebagaimana diketahui bahwa sekolah merupakan aset yang berupa layanan publik dalam sektor pendidikan, juga memerlukan konsep optimalisasi. Maka konsep optimalisasi aset pendidikan memerlukan pemahaman berbagai

variabel yang mempengaruhi pemanfaatan aset pendidikan agar sesuai harapan. Aset ini harus dapat dilihat dari sisi manfaat, hasil atau produksi yang tidak terukur dengan uang (non moneter).

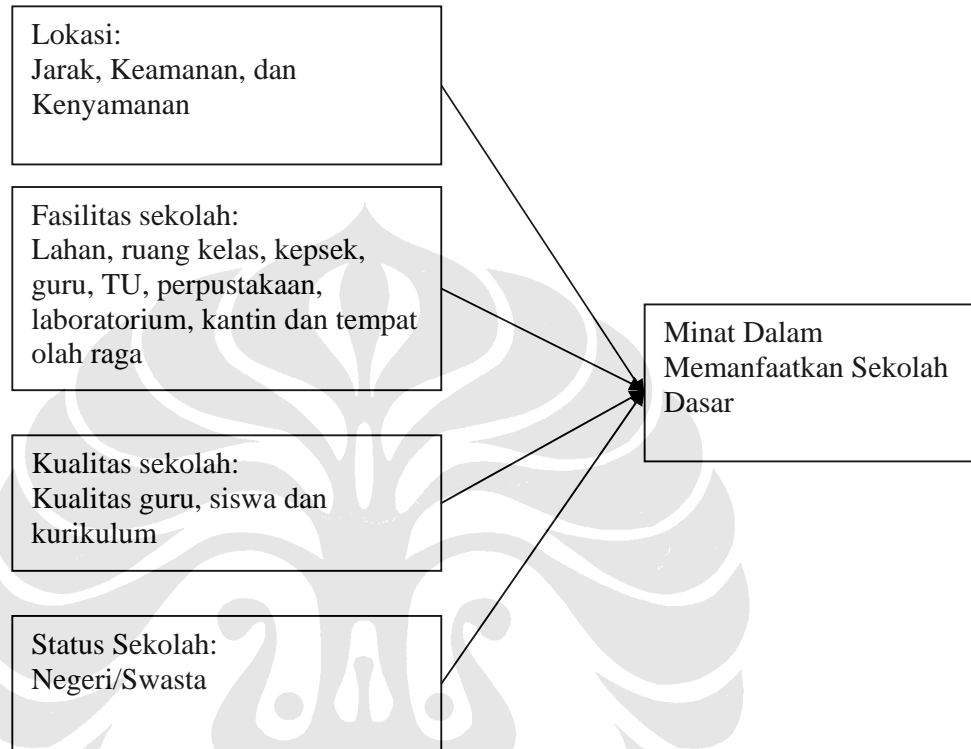
3.7.Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

3.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada alur yang dikembangkan pada kerangka pikir, model konsep penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut :



3.9 Hipotesis

Ho : tidak ada pengaruh antara lokasi sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang

Ha : ada pengaruh antara lokasi sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang.

Ho : tidak ada pengaruh antara fasilitas sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang

Ha : ada pengaruh antara fasilitas sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang.

Ho : tidak ada pengaruh antara kualitas sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang

Ha : ada pengaruh antara kualitas sekolah terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang.

Ho : tidak ada pengaruh antara lokasi, fasilitas dan kualitas sekolah secara bersama terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang

Ha : ada pengaruh antara lokasi, fasilitas dan kualitas sekolah secara bersama terhadap minat masyarakat untuk memanfaatkan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanah Abang .

3.10 Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang sekolah dasar, diantaranya adalah :

3.6.1 Hasil penelitian Indah Susilowati (2005) dengan judul Penyediaan Sekolah Dasar di Kecamatan Kelapa Gading, meneliti tentang penyediaan sekolah dasar, penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penerapan pendekatan penyediaan sekolah dasar, dan teori-teori yang terkait dengan penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading. Metodologi penelitiannya melalui analisis deskriptif, analisis perbandingan, analisis non parametrik, analisis faktor dan analisis keruangan. Hasil penelitiannya berupa pemberdayaan swasta pendidikan maupun swasta non pendidikan, penyesuaian pendekatan dengan kondisi sekarang, peningkatan kemitraan, peningkatan perencanaan kota yang lebih integratif dan akomodatif dengan perkembangan minat swasta, pasar/masyarakat, dan sumber daya kota.

3.6.2 Hasil penelitian Lekat Riniyadi tentang Sekolah di tengah masyarakat : Kasus kurang diminatnya SD Negeri 71 Kotamadya Bengkulu oleh Anak-Anak

Kelompok Masyarakat Terpelajar, meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat terpelajar Pematang Gubernur kurang berminat terhadap SD Negeri 71 Kotamadya Bengkulu , serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak SD Negeri Bengkulu diminati. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sekolah, faktor ekonomi, keadaan siswa, disiplin merupakan faktor pertimbangan utama bagi masyarakat terpelajar dalam memilih sekolah sebagai tempat menyekolahkan anaknya,

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini dengan objek sekolah dasar negeri. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Selain itu juga meneliti tentang pengaruh fasilitas yang tersedia di sekolah dasar negeri secara lebih menyeluruh. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner, observasi lapangan, studi dokumentasi. Metode penelitian menggunakan metode statistik melalui uji asosiasi antar variabel dan uji regresi logistik biner. Penelitian ini untuk melihat lokasi sekolah dasar terkait dengan jarak, keamanan dan kenyamanan dengan minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri. Di samping itu melihat lebih dalam hubungan dan pengaruh kelengkapan fasilitas dan kualitas sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Tanah Abang terhadap minat masyarakat memanfaatkan sekolah dasar negeri tersebut.